

Faktor Faktor *Determinant* Pertumbuhan Ekonomi *Regional* Pada Masa Pandemi Di Jawa Tengah

Kartika Widyasari¹⁾ Dr. Novi Dirgantari,²⁾ Dr. Sri Wahyuni,³⁾ Hardiyanto Wibowo,⁴⁾
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
widyasarikartika05@gmail.com¹⁾, novidirgantari@ymail.com²⁾, yuniku-7067@gmail.com³⁾,
hardiyantowb2d@gmail.com⁴⁾

*Corresponding Author

Diajukan : 24 November 2022

Disetujui : 13 Desember 2022

Dipublikasi : 1 April 2023

ABSTRACT

Due to the covid-19 pandemic, which is assumed to be equivalent to the economic crisis, regions in Central Java are one of the regions that are economically highly affected. This is evidenced by the decline in GRDP to -2.65 in the mid-May 2021 period. This research tries to answer the gap between the results of previous research on the variables of local own-source revenue, capital expenditure, unsuspent funds and budget refocusing on regional economic growth. The purpose of this study is to empirically examine the impact of local own-source revenue, capital expenditure, unsuspent funds (SiLPA) and budget refocusing on regional economic growth in central Java regions and cities in 2019-2021. The research method used is quantitative with secondary data and multiple linear regression as the data analysis technique. The data collection technique in this study used a saturated sampling technique with a sample of 35 districts and cities in Central Java. The results showed that local own-source revenue (PAD), capital expenditure and unsuspent funds have a positive effects on regional economic growth. Meanwhile, budget refocusing have no effect on regional economic growth.

Keywords: *Local own-source revenue; Capital expenditure; Unsuspent funds; Budget refocusing; Regional economic growth*

ABSTRAK

Semenjak adanya pandemi covid-19 yang diasumsikan setara dengan masa krisis ekonomi, daerah-daerah di Jawa Tengah menjadi salah satu kawasan yang terdampak cukup tinggi secara perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan PDRB menjadi -2,65 di periode pertengahan Mei 2021. Penelitian ini mencoba menjawab kesenjangan antar hasil penelitian terdahulu pada variabel pendapatan asli daerah, belanja modal, sisa lebih pembiayaan anggaran dan perubahan anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi *regional*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, SiLPA dan perubahan anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi *regional* pada Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Tengah tahun 2019-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan data sekunder dan regresi linier berganda sebagai teknik analisis datanya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dengan sampel sebanyak 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, belanja modal dan SiLPA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi *regional*. Sedangkan perubahan anggaran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi *regional*.

Kata kunci: *Pendapatan asli daerah, belanja modal, sisa lebih pembiayaan anggaran, perubahan anggaran, dan pertumbuhan ekonomi regional*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi masih menjadi tujuan penting dalam perekonomian suatu daerah, terutama bagi daerah-daerah di negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi *regional* dapat diartikan pula sebagai peningkatan pendapatan per kapita dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada satu kawasan tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi komponen penting untuk keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah (Diastrina, 2021). Berada di daerah yang cukup strategis, menjadikan Provinsi Jawa Tengah mempunyai sumberdaya alam, sarana, prasarana serta sumberdaya manusia yang memadai. Sehingga memiliki potensi yang baik untuk meningkatkan perekonomian yang ada dibandingkan provinsi-provinsi lainnya (Winarni dkk., 2020). Namun, semenjak adanya pandemi covid-19 yang diasumsikan setara dengan masa krisis ekonomi, daerah-daerah di Jawa Tengah menjadi salah satu kawasan yang terdampak cukup tinggi secara perekonomian. Terjadi penurunan PDRB menjadi -2,65 di periode pertengahan Mei 2021 (Indonesia, 2021). Padahal di Jawa Tengah terdapat jumlah penduduk sebanyak 36,52 juta jiwa (Jateng.bps.go.id, 2021), atau hampir 15% dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menjadi permasalahan yang serius terhadap stabilitas ekonomi daerah apabila tidak tertangani dengan baik.

Pada tahun 2019, pemerintah daerah dalam meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi menggunakan anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur. Tetapi, di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi pada Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah mengalami kontraksi yang cukup berat. Hal ini dibuktikan dengan permasalahan yang ada di salah satu pemerintah daerah di Jawa Tengah ialah Kota Semarang yang mempunyai nilai PDRB pada tahun 2019 sebesar Rp 19,352 miliar rupiah sedangkan pada tahun 2020 menjadi Rp 188,757 miliar rupiah (bps.go.id, 2022). Kasus seperti ini terjadi karena anggaran yang seharusnya untuk infrastruktur justru digeser untuk penanganan covid-19 (Bappeda Propinsi Jawa Tengah, 2020).

Pemerintah daerah telah berusaha memulihkan perekonomian daerahnya yaitu dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Disamping itu pemerintah daerah juga mengeluarkan anggaran untuk belanja modal guna menambah asset tetap maupun lainnya yang akan berpengaruh terhadap pembiayaan dan penerimaan daerah (Yasin, 2019). Pembiayaan daerah yang berupa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur baik dibidang kesehatan, pendidikan maupun transportasi menjadikan masyarakat bisa menggunakan dan menikmati manfaatnya sehingga terciptalah kesejahteraan masyarakat. Selain itu, efisiensi dan efektifitas di sektor-sektor yang ada muncul karena infrastruktur yang baik. Sehingga masyarakat menjadi lebih produktif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di daerahnya. Berdasarkan data Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2020 *refocusing* anggaran atau perubahan anggaran yang mengutamakan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu seperti penanganan covid-19 ini hampir mencapai 60% dari besaran APBD di masing masing pemerintah daerah di Jawa Tengah. Lamanya pandemi Covid-19 dan dampaknya menyebabkan daerah-daerah tersebut juga terkena penurunan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah/*regional*. Salah satunya diduga akibat berhentinya beberapa belanja modal produktif yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan daerah terpaksa ditunda kontrak hingga 20 bulan berikutnya (Bappeda Propinsi Jawa Tengah, 2020). Begitu juga PAD yang tidak bisa terkontrol demi percepatan penanganan covid-19 ini.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian (Aini et al., 2019), (Akhmad et al., 2019), (Sengaji et al., 2019), (Sukmaadi & Marhaeni, 2021) dan (Tuwo et al., 2021) menemukan hasil bahwa pendapatan asli daerah atau PAD berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi *regional*. Serta (Diastrina, 2021) dan (Djayanthi & Juniarti, 2020) menyebutkan bahwa adanya dampak yang signifikan antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi *regional*. Namun pada penelitian (Yasin, 2019) menyatakan bahwa PAD memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi *regional*. Sedangkan (Dwiarta & Asjari, 2020) menyatakan bahwa tidak adanya dampak PAD pada pertumbuhan ekonomi *regional*.

Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi *regional* yang dikaji oleh (Winarni et al., 2020), (Sukmaadi & Marhaeni, 2021) dan (Istianto et

al., 2021) menunjukkan hasil bahwa belanja modal mempunyai dampak positif pada pertumbuhan ekonomi *regional*. Sedangkan (Djayanthi & Juniarti, 2020) dan (Saputra et al., 2021) menyatakan bahwa belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi *regional* hanya mempunyai pengaruh saja. Tetapi (Akhmad et al., 2019) dan (Tuwo et al., 2021) menemukan hasil bahwa terdapat dampak negatif antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi *regional*. (Dwiarta & Asjari, 2020) menyatakan bahwa antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi *regional* tidak memiliki dampak.

Penelitian yang dikaji oleh (Kurantin, 2017) dan (Todorova, 2019) mengungkapkan bahwa variabel SiLPA dengan pertumbuhan ekonomi *regional* mempunyai pengaruh positif. Tetapi, pada hasil penelitian (Diastrina, 2021) dan (Sengaji et al., 2019) menemukan bahwa SiLPA tidak berdampak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi *regional*. Selanjutnya pada hasil penelitian (Khatulistiwa, 2021) menyatakan bahwa perubahan anggaran memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi *regional*.

Pada hasil penelitian terdahulu, membuktikan bahwa penelitian satu dengan yang lainnya masih menunjukkan hasil yang berbeda. Maka perlu dilakukan penelitian kembali dengan permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu apakah PAD, belanja modal, SiLPA dan perubahan anggaran mempunyai pengaruh positif secara empiris dengan pertumbuhan ekonomi *regional* pada masa pandemi di Kota dan Kabupaten yang ada di Jawa Tengah?. Serta penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji secara empiris PAD, belanja modal, SiLPA dan perubahan anggaran memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi *regional* dimasa pandemi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis mengenai pengaruh PAD, belanja modal, SiLPA dan perubahan anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi *regional* pada masa pandemi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai realokasi anggaran dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah selama masa pandemi.

STUDI LITERATUR

Teori Pertumbuhan *Solow-Swan*

Teori pertumbuhan *Solow-Swan* yang dikenal sebagai teori pertumbuhan neoklasik, merupakan pengembangan dari mazhab historis. Teori ini merupakan bentuk pembaharuan teori Harrod-Domar (Karlinda et al., 2015). Teori *Solow-Swan* menjelaskan bahwa faktor penentu tingkat pertumbuhan output adalah pertumbuhan eksogen. Ketiga bentuk faktor eksogen tersebut terdiri dari akumulasi modal, jumlah tenaga kerja, dan teknologi. Akumulasi modal dibentuk oleh tabungan, konsumsi, dan investasi. Jika pendapatan yang ditabung semakin besar, maka akan diikuti dengan peningkatan jumlah investasi. Kemudian faktor banyaknya tenaga kerja ditentukan oleh total penduduk dalam suatu Negara. Faktor yang terakhir yaitu kemajuan teknologi, dapat diukur dengan menggunakan indikator peningkatan jumlah barang produksi setiap periode tahunnya. Jika banyaknya produksi barang mengalami kenaikan maka konsekuensinya akan diikuti dengan *upgrade* teknologi. Hal ini terjadi karena peningkatan produksi barang perlu diimbangi dengan peningkatan jumlah alat produksi mesin, agar dapat memenuhi kapasitas kebutuhan barang (Amalia et al., 2016).

Teori Kapasitas Daerah

Kemampuan atau kapasitas pemerintah daerah untuk memperoleh layanan publik merupakan cara bekerjanya *governability*. *Governability* diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan dan regulasi (Vincent, 2015). *Governability* menurut Praktino dan Lay (2007) salah satunya untuk pengelolaan dan persediaan barang politik (*political goods*). Di dalam politik, standar perilaku yang mengatur antara masyarakat dan penyediaan infrastruktur diantaranya terdapat hukum, keamanan dan pelayanan terhadap masyarakat serta peluang ekonomi dan lingkungan usaha yang baik dan akses ruang publik bagi masyarakat merupakan

definisi dari *political goods*. Praktino dan lay menyatakan hasil *political goods* bersangkutan dengan kapasitas pemerintah daerah yang merupakan bagian dari *governability*. Fungsi *political goods* di pemerintah daerah sebagai dasar untuk mempunyai tindakan yang memadai dalam meraih kapasitas daerah. Terdapat berbagai bentuk kapasitas pemerintah daerah yaitu kapasitas ekstraktif yang artinya pengembangan potensi daerah dan sumberdaya sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk menggerakannya. Kedua, regulatif yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk mengembangkan kerangka peraturan untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kepentingan daerah. Ketiga distribusi, yakni Kemampuan pemerintah daerah untuk berbagi kekuasaan, tugas, tanggung jawab dan sumber daya antara semua stakeholder kepentingan di daerah. Keempat, responsif yaitu untuk menanggapi perubahan kondisi, aspirasi dan preferensi masyarakat lokal merupakan bagian dari kemampuan pemda. Kelima linkage, yaitu kapasitas untuk pengembangan jaringan, kolaborasi atau kemitraan di tingkat lokal, nasional dan internasional, untuk mendorong kapasitas lainnya (Choi, 2021).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi *regional*

Semua penerimaan daerah yang bersumber dari pungutan wilayah sendiri serta sumber ekonomi asli dari daerah tersebut sesuai perda dari perundang undangan yang berlaku merupakan pendapatan asli daerah (Tuwo et al., 2021). Sedangkan menurut (Akhmad et al., 2019), mendefinisikan PAD sebagai pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah serta hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah yang sah.

Hasil penelitian terdahulu, diantaranya menyatakan tentang keterkaitan antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi yang telah dikaji sebelumnya oleh (Aini, Kurnia, & Wibisono, 2019), (Sengaji, Sasongko, & Sakti, 2019), (Sukmaadi & Marhaeni, 2021), (Akhmad, 2019) dengan hasil pendapatan asli daerah atau PAD berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pada teori *Solow-Swan* menyatakan, pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh sumberdaya manusia dan sumberdaya modal. Jika suatu wilayah memiliki kualitas dan kuantitas manusia yang baik begitu pula dengan modal yang ada, maka produktivitas daerah tersebut akan semakin meningkat. Hal ini, menambah pemasukan untuk daerah yang kemudian menciptakan kemandirian daerah yang tidak hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah. Struktur pendapatan daerah yang kuat akan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diambil yaitu:

H_1 : Pendapatan asli daerah berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi *regional*.

Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi *regional*

Standar akuntansi pemerintah (SAP) menyatakan bahwa belanja modal ialah sejumlah pengeluaran yang ditujukan untuk membentuk modal. Pembentukan modal ini bertujuan meningkatkan jumlah aset yang memiliki manfaat umur ekonomis lebih dari satu periode akuntansi. Jenis belanja ini meliputi biaya pemeliharaan yang memiliki karakteristik mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Pertambahan nilai aset yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dapat meningkatkan pelayanan publik. Baik melalui pembangunan gedung layanan publik ataupun pembangunan sarana prasarana pendukung aktivitas perekonomian seperti infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi. Peningkatan realisasi anggaran belanja modal, maka secara langsung berdampak terhadap pergerakan positif sektor riil di masyarakat. Hal ini dapat ditandai dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penggunaan bahan baku produksi, serta kenaikan aktivitas di sektor-sektor jasa dalam suatu wilayah. Kosekuensinya, peningkatan belanja modal pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi *regional* (Istianto, Kumenaung, & P. Lopian, 2021).

Telah terdapat beberapa penelitian tentang keterkaitan antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi *regional* sebelumnya. Penelitian dari (Sukmaadi & Marhaeni, 2021), (Winarni, Ahmad, & Suharno, 2020), (Istianto, Kumenaung, & P. Lopian, 2021) menemukan

hasil bahwa terdapat dampak positif antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi *regional*. Sesuai dengan teori *Solow-Swan* yang dikembangkan oleh Robert Sollow bahwa belanja modal dialokasikan untuk memperoleh asset baik tetap maupun lainnya. Dan belanja modal juga digunakan oleh pemerintah daerah sebagai belanja investasi. Kenaikan jumlah pengeluaran belanja modal, akan diikuti oleh peningkatan pembentukan asset. Mekanisme tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan produktivitas daerah, sehingga output yang dihasilkan juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan output tersebut pada akhirnya menunjang kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diambil yaitu:

H_2 : Belanja modal berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi *regional*.

Pengaruh SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi *regional*

Perhitungan selisih lebih perhitungan anggaran atau SiLPA yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) No. 13 tahun 2006, disebutkan bahwa SiLPA adalah lebihan dana yang dihasilkan dari selisih antara penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah dalam kurun waktu satu periode. Jumlah SiLPA yang ideal digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di Kabupaten atau Kota di daerah tersebut (Aditya & Dirgantari, 2017). Selain itu, SiLPA juga digunakan untuk menjalankan program kegiatan yang pengerjaannya belum diselesaikan pada periode tahun sebelumnya begitu juga untuk mendanai kegiatan baru yang tidak dianggarkan dalam APBD (Todorova, 2019).

Dalam penelitian (Kurantin, 2017) dan (Todorova, 2019) menemukan hasil bahwa SiLPA mempunyai dampak positif dengan pertumbuhan ekonomi jika SiLPA tidak mengalami defisit anggaran. Pada teori *Solow-Swan* dengan menggunakan asumsi penuh sumber daya, menyatakan bahwa defisit anggaran dapat meningkatkan konsumsi saat ini karena individu mengalihkan pajak, ke generasi mendatang. Akibat dari meningkatnya konsumsi masyarakat menyebabkan penurunan tabungan atau investasi. Karena itu, suku bunga harus tetap naik untuk membawa keseimbangan di pasar modal. Peningkatan suku bunga tersebut, mengakibatkan penurunan sektor swasta dalam bentuk investasi (Kurantin, 2017). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika SiLPA daerah mengalami defisit anggaran, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonominya. Namun sebaliknya, jika SiLPA daerah mengalami surplus anggaran maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diambil yaitu:

H_3 : Sisa lebih pembiayaan anggaran berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi *regional*.

Pengaruh perubahan anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi *regional*

Refocusing merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan potensi resesi ekonomi sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional. Tindakan *Refocusing* dapat dilakukan oleh negara untuk memastikan stabilitas keuangan yang terbebas dari goncangan ekonomi global yang berpotensi mengakibatkan penurunan situasi ekonomi karena dihadapkan kondisi krisis. Kebijakan *refocusing* tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang berisi terkait ruang lingkup kegiatan *refocusing* dan pengalokasian kembali anggaran dengan mengadakan barang dan jasa guna mempercepat penanganan pandemic covid-19 (Khatulistiwa, 2021).

Kebijakan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah berpengaruh besar terhadap kegiatan kegiatan dinas dan badan di daerah. Hal ini mengakibatkan perencanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan harus dihitung ulang dengan tepat, baik dari sisi target sasaran maupun jenis program yang akan dilaksanakan ke depan. Kebijakan pemotongan anggaran tersebut berkorelasi negatif jumlah kebutuhan pembiayaan dan upaya peningkatan sumber pendapatan asli daerah di masa pandemi (Rahmawati et al., 2021).

Kondisi tersebut menekan Pemerintah Daerah untuk dapat mengalokasikan dana yang terbatas guna membiayai program program tambahan dalam rangka penanganan dan pemulihan

covid-19. Realokasi anggaran tersebut sebenarnya relevan dengan tujuan penanggulangan dampak pandemi, yaitu mendukung pemulihan ekonomi dan memberi perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak.

Upaya realokasi tersebut dilakukan dengan melakukan beberapa hal, antara lain pengurangan agenda pemerintah dalam bentuk pengurangan kunjungan kerja, jumlah pertemuan dan penundaan belanja modal dan infrastruktur yang dapat dilakukan penundaan (Rahmawati et al., 2021). Ditinjau dari sudut pandang teori kapasitas daerah, pemerintah daerah yang memiliki kapasitas distribusi yang baik maka akan mampu menerapkan anggaran berbasis kinerja, sehingga kebijakan realokasi anggaran akan tetap dapat menjaga stabilitas perekonomian daerah sebagai salah satu target capaian pembangunan (Choi, 2021).

Selain itu, ditinjau dari kapasitas ekstraktif, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi sumberdaya yang ada sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah, meskipun melakukan realokasi anggaran, pemerintah daerah masih akan mempertimbangkan keseimbangan neraca keuangan daerah. Hal inilah yang juga akan menjaga pertumbuhan ekonomi daerah (Choi, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diambil yaitu:

H_4 : Perubahan anggaran berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi *regional*.

METODE

Metode pengumpulan data yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersumber dari PPID BPK dan Peraturan Daerah dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta Badan Pusat Statistik Nasional (BPS RI) khususnya pada Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2021. Sementara itu, populasi yang digunakan adalah seluruh pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2019-2021. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dengan metode analisis data yaitu analisis regresi linear berganda.

Definisi Operasional Variabel

Pertumbuhan Ekonomi *Regional* sebagai Y

Kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan per kapita yang berasal dari sektor pendapatan, belanja / pengeluaran dan produksi baik berupa barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam jumlah kecil maupun besar merupakan definisi dari pertumbuhan ekonomi *regional*. Hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih sejahtera dan menurunkan angka pengangguran serta kemiskinan dalam jangka waktu panjang (Yasin, 2019). Jadi, apabila pendapatan masyarakat mengalami kenaikan setiap tahunnya, maka dapat dikatakan perekonomian suatu negara maupun daerah tersebut meningkat pula. Serta menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebagai indikator pengukuran variabelnya (Diastrina, 2021).

Pendapatan asli daerah atau PAD sebagai X1

Dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, mengungkapkan bahwa PAD bersumber dari : retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hasil pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Pada sumber lain-lain PAD yang sah juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : pendapatan bunga, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, komisi serta pemotongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah dan jasa giro serta keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pendapatan asli daerah dapat diukur dengan menjumlahkan seluruh sumber-sumber PAD yang telah diuraikan diatas.

Belanja Modal sebagai X2

Belanja anggaran yang dimanfaatkan untuk menambah dan memperoleh aset tetap maupun aset lainnya dengan melebihi batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta memberikan manfaat lebih dari 1 periode akuntansi merupakan belanja modal. Aset tetap tersebut dimanfaatkan untuk setiap kegiatan pada suatu unit kerja bukan untuk dijual. (Djyanthi & Juniarti, 2020). Dalam Peraturan Perundang-undangan No. 12 tahun 2019, belanja modal memiliki beberapa indikator sebagai berikut: belanja jalan, belanja tanah, belanja bangunan dan gedung, belanja peralatan dan mesin, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya serta belanja irigasi dan jaringan. Untuk pengukuran variabel belanja modal yaitu dengan menjumlahkan semua indikator yang ada.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA sebagai X3

Definisi SiLPA menurut Peraturan Perundang-undangan No. 58 tahun 2005 ialah pengurangan dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama kurun waktu satu periode anggaran. Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan, pemerintah daerah memiliki dasar penentunya yaitu dengan jumlah SiLPA yang ideal (Aditya & Dirgantari, 2017). Selain itu untuk menjalankan kegiatan yang pengerjaannya belum selesai pada periode tahun sebelumnya dan untuk membiayai kegiatan baru yang tidak dianggarkan dalam APBD, pemerintah daerah menggunakan anggaran SiLPA juga (Todorova, 2019). Maka, untuk mengukur SiLPA menggunakan rumus:

SiLPA = Realisasi Penerimaan Anggaran - Pengeluaran Anggaran.

Perubahan Anggaran sebagai X4

Salah satu alternatif pemerintah dalam menjamin stabilitas ekonomi nasional dan menangani resesi ekonomi adalah dengan melakukan *refocusing* / perubahan anggaran (Khatulistiwa, 2021). Hal ini telah disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan covid-19 dengan melakukan kegiatan *refocusing* dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa. Perubahan anggaran dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Perubahan anggaran} = (\text{Total Pendapatan} - \text{Total Pengeluaran}) + \text{Penerimaan Pembiayaan Daerah} - \text{Pengeluaran Pembiayaan Daerah}$$

(t-1) = search LKPD Perubahan Anggaran jika diketerangan tidak dicantumkan angka maka mengambil dari website JDIH dari masing-masing daerah.

HASIL

Tabel 1 Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	91	Rp212.777.435.293,61	Rp 2.385.944.758.477	Rp 429.829.590.600,6776	Rp 339.065.915.819,98360
BM	91	Rp 102.083.054.523	Rp 1.054.761.429.772	Rp 306.317.622.429,2117	Rp 155.221.839.808,22458
SiLPA	91	Rp 40.143.795.816,80	Rp 515.914.307.427	Rp 205.404.659.084,8409	Rp 102.783.329.389,03282
PA	91	Rp -137.795.665.453	Rp 2.241.143.592.000	Rp 153.800.213.665,4791	Rp 273.487.293.796,09918
PER	91	Rp 8.713.000.000	Rp 205.385.000.000	Rp 34.974.571.428,5714	Rp 31.833.493.503,66087

Source : OUTPUT SPSS 2022

Berdasarkan tabel diatas hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa sampel yang digunakan berjumlah 91 data penelitian. Pada variabel pertumbuhan ekonomi *regional* (PER) mempunyai nilai minimum sebesar Rp 8.713.000.000 yang diperoleh dari Kota Magelang pada tahun 2020 dan nilai maximum sebesar Rp 205.385.000.000 di Kota Semarang tahun 2021. Hal ini disebabkan karena Kota Magelang telah menggunakan anggaran yang seharusnya untuk infrastruktur justru untuk percepatan penanganan covid-19. Sedangkan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2021 telah menggunakan anggaran yang semula untuk penanganan covid-19 digeser ke anggaran untuk pemulihan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut mengalami kenaikan. Nilai rata-rata sebesar Rp 34.974.571.428,5714 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp 31.833.493.503,66087.

Pada variabel pendapatan asli daerah atau PAD memperoleh nilai minimum dari Kota Pekalongan pada tahun 2019 sebesar Rp 212.777.435.293,61 dan nilai maximum nya sebesar Rp 2.385.944.758.477 di Kota Semarang pada tahun 2021. Nilai rata-rata sebesar Rp 429.829.590.600,6776 nilai standar deviasi sebesar Rp 339.065.915.819,98360. Sementara itu, belanja modal (BM) memiliki nilai minimum sebesar Rp 102.083.054.523 yang diperoleh dari Kabupaten Temanggung tahun 2020 dan memperoleh nilai maximum dari Kota Semarang pada tahun 2019 sebesar Rp 1.054.761.429.772. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar Rp 306.317.622.429,2117 dengan nilai standar deviasi yaitu Rp 155.221.839.808,22458.

Pada variabel sisa lebih pembiayaan anggaran atau SiLPA mempunyai nilai minimum sebesar Rp 40.143.795.816,80 yang diperoleh dari Kabupaten Rembang tahun 2019 dan mempunyai nilai maximum yang diperoleh dari Kabupaten Sragen pada tahun 2021 sebesar Rp 515.914.307.427. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar Rp 205.404.659.084,84097 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp 102.783.329.389,03282. Sedangkan pada variabel perubahan anggaran (PA) memperoleh nilai minimum dari Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebesar Rp -137.795.665.453 dan nilai maximum sebesar Rp 2.241.143.592.000 yang diperoleh dari Kabupaten Sukoharjo tahun 2020. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar Rp 153.800.213.665,4791 dengan nilai standar deviasi yaitu Rp 273.487.293.796,09918

Tabel 2 Uji Analisis Regresi *Linier* Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-13.252.879.255,669	2.202.125.047,410	
Pendapatan asli daerah (PAD)	0,083	0,003	0,889
Belanja modal (BM)	0,023	0,006	0,114
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)	0,026	0,007	0,083
Perubahan anggaran (PA)	-0,001	0,003	-0,005

Source : OUTPUT SPSS 2022

Dapat dilihat persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi regional (PER)} = \alpha + \beta_1\text{PAD} + \beta_2\text{BM} + \beta_3\text{SiLPA} + \beta_4\text{PA} + e$$

$$\text{PER} = -13.252.879.255,669 + 0,083\text{PAD} + 0,023\text{BM} + 0,026\text{SiLPA} + -0,001\text{PA} + e$$

Dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

α = Nilai konstanta yang dihasilkan sebesar -13.252.879.255,669, dimana hasil tersebut menunjukkan hasil yang negatif sehingga dapat diartikan bahwa apabila variabel PAD, belanja

modal, SiLPA dan perubahan anggaran bernilai 0 maka nilai pertumbuhan ekonomi *regionalnya* sebesar -13.252.879.255,669

β_1 = Koefisien PAD sebesar 0,083 menunjukkan setiap kenaikan PAD sebesar 1 rupiah diikuti kenaikan pertumbuhan ekonomi *regionalnya* sebesar 0,083

β_2 = Koefisien belanja modal sebesar 0,023 menunjukkan setiap kenaikan belanja modal sebesar 1 rupiah, maka menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi *regionalnya* sebesar 0,023

β_3 = Koefisien SiLPA sebesar 0,026 menunjukkan setiap kenaikan variabel SiLPA sebesar 1 rupiah maka menaikkan pertumbuhan ekonomi *regionalnya* sebesar 0,026

β_4 = Koefisien perubahan anggaran sebesar -0,001 menunjukkan setiap kenaikan variabel SiLPA sebesar 1 rupiah, maka menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi *regionalnya* sebesar 0,001

e = Kesalahan pengukuran pada variabel bebas untuk menjelaskan atau mengukur variabel terikat.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji tentang analisis pengaruh variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi *regional*. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan yaitu:

Pengaruh PAD (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi *regional* (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa adanya dampak positif antara variabel pendapatan asli daerah atau PAD dengan pertumbuhan ekonomi *regional*. Hasil tersebut didapatkan dari tabel uji t dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai t-hitung sebesar 28,425 lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 1,988.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori *Solow-Swan* yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya sumberdaya manusia dan sumberdaya modal. Jika suatu wilayah memiliki kualitas dan kuantitas manusia yang baik begitu pula dengan modal yang ada, maka produktivitas daerah tersebut juga akan semakin meningkat begitu juga pertumbuhan ekonomi *regionalnya*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Aini, Kurnia, & Wibisono, 2019), (Sengaji, Sasongko, & Sakti, 2019), (Sukmaadi & Marhaeni, 2021) dan (Akhmad, 2019). Dalam penelitiannya yang memiliki hasil penelitian berupa variabel PAD berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi *regional*.

Pengaruh belanja modal (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi *regional* (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel belanja modal mempunyai dampak positif pada pertumbuhan ekonomi *regional*. Hasil tersebut dapat didapatkan pada tabel uji t dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai t-hitung sebesar 3,712 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,988.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *Solow-Swan* yang menyatakan bahwa belanja modal dialokasikan untuk memperoleh asset baik tetap maupun lainnya. Dan belanja modal juga digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai belanja investasi. Semakin besar belanja modal yang dikeluarkan, maka aset yang terbentuk akan semakin tinggi begitu pula produktivitas daerah akan meningkat. Hal ini, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari (Sukmaadi & Marhaeni, 2021), (Winarni, Ahmad, & Suharno, 2020), (Istianto, Kumenaung, & P. Lopian, 2021). Dalam penelitiannya yang memiliki hasil penelitian berupa variabel belanja modal berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi *regional*.

Pengaruh SiLPA (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi *regional* (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi *regional*. Hasil tersebut dapat didapatkan dari tabel uji t dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t-hitung sebesar 3,564 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,988.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *Solow-Swan* dengan menggunakan asumsi penuh sumber daya, menyatakan bahwa defisit anggaran dapat meningkatkan konsumsi saat ini karena

individu mengalihkan pajak, ke generasi mendatang. Akibat dari meningkatnya konsumsi masyarakat menyebabkan penurunan tabungan atau investasi. Karena itu, jika SiLPA daerah mengalami defisit anggaran, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonominya. Namun sebaliknya, jika SiLPA daerah mengalami surplus anggaran maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kurantin, 2017) dan (Todorova, 2019). Dalam penelitiannya yang menemukan hasil variabel SiLPA berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi *regional*.

Pengaruh perubahan anggaran (X4) terhadap pertumbuhan ekonomi *regional* (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa perubahan anggaran tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi *regional*. Hasil tersebut dapat didapatkan pada tabel uji t dengan nilai signifikansi sebesar $0,841 > 0,05$ dengan nilai t-hitung sebesar $-0,201$ lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar $1,988$.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kapasitas daerah yang menjelaskan bahwa daerah akan mampu untuk mencapai target pembangunan jika memiliki kapasitas ekstraktif, yaitu kemampuan untuk memobilisasi sumberdaya yang dimiliki dalam hal ini adalah kemampuan untuk melakukan relokasi anggaran. Pada daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya, maka upaya untuk mencapai target pembangunan tersebut akan menghadapi berbagai hambatan, apalagi ketika dihadapkan pada situasi tekanan ekonomi. Selain itu ditinjau dari kapasitas *responsive* dalam kerangka teori kapasitas daerah, kemampuan daerah menanggapi perubahan kondisi sosial dan ekonomi akan menentukan capaian target pembangunan salah satunya pertumbuhan ekonomi *regional*. Pada daerah daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya ditambah dengan memiliki kapasitas distribusi yang buruk karena rendahnya kemampuan menerapkan anggaran berbasis kinerja, maka upaya realokasi anggaran tidak akan memiliki dampak yang signifikan terhadap target capaian pembangunan (Choi, 2021)

KESIMPULAN

Menurut hasil analisis diatas dapat di simpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi *regional* di Jawa Tengah. Begitu pula belanja modal berpengaruh positif juga terhadap pertumbuhan ekonomi *regional* di Jawa Tengah. Serta adanya pengaruh positif antara variabel SiLPA dengan pertumbuhan ekonomi *regional* di Jawa Tengah. Sementara itu, pada variabel perubahan anggaran tidak mempunyai pengaruh dengan pertumbuhan ekonomi *regional* di Jawa Tengah. Keterbatasan pada penelitian ini yaitu hanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi produk domestik regional bruto atau PDRB, yang hanya mengukur dari sisi dasar harga berlaku. Padahal Produk Domestik Regional Bruto merupakan hasil proses pembangunan dan pengalokasian anggaran yang dilakukan secara berkesinambungan dan hanya menggambarkan secara semu saja pertumbuhan ekonomi (World Bank, 2022). Dalam masa pandemi dimana tekanan ekonomi cukup tinggi, indikator pertumbuhan ekonomi tidak dapat hanya dilihat dari sisi kontribusi ekonomi, namun perlu diukur dari sisi *well being*, atau kesejahteraan yang tetap stabil (Murtin, Vincent, Lara, Julien dan Balazs, 2022). Pada penelitian selanjutnya disarankan menggunakan indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi yang lebih relevan dengan kondisi tekanan ekonomi, yaitu pengukuran berbasis pendekatan *well being* (Murtin, Vincent, Lara, Julien dan Balazs, 2022).

REFERENSI

- Aditya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Kompartemen*, XV(1), 42–56.
- Amalia, K., Kiftiah, M., & Sulistianingsih, E. (2016). *Penerapan Teori Solow Swan*. 05(1), 39–44.
- Indonesia, B. (2021). Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah. *Bank Indonesia*, Februari.

www.bi.go.id

- Istianto, T., Kumenaung, A. G., & Lopian, A. L. C. P. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Bolaang Mongondow Raya. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(3), 75–95.
- Karlinda, E., Rheza, M. I., Agustine, T. E., & Sianturi, M. N. (2015). Optimalisasi Fiskal bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Peran Belanja Operasional dan Belanja Modal dalam APBD. *Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)*, 1–22.
- Rahmawati, I., Rusman, R., & ... (2021). Efektivitas Kebijakan Realokasi Dan Penyesuaian Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus *Sintesa Stie ...*, 19, 1–10. <http://ejournal.stie11april-sumedang.ac.id/ojs/index.php/ejournalstiesas/article/view/114>
- Saputra, M. R., Haliah, & Indrijawati, A. (2021). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Akrual: Jurnal Bisnis Da Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 129–134. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/akrual/article/view/14810>
- Tuwo, R. D., Rotinsulu, D. C., & Kawung, G. M. . (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(4), 79–90. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/36445>
- Winarni, E., Ahmad, A. A., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Investasi dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 447–450. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.946>
- Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Diunduh di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Diunduh di <https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%2012%20Tahun%202019#:~:text=Undang%20DUndang%20UU%20Nomor%2012%20Tahun%202019%20tanggal%2017%20September%202019,-Pertanggungjawaban%20atas%20Pelaksanaan&text=UU%20Nomor%2012%20Tahun%202019%20tanggal%2017%20September%202019%2C%20tentang,Belanja%20Negara%20Tahun%20Anggaran%202018>.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diunduh di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>
- Instruksi Presiden (INPRES) Nomer 4, 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Diunduh di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134755/inpres-no-4-tahun-2020>
- Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 2020. Kajian Strategis Dampak Covid 19 terhadap Kondisi Ekonomi dan Postur APBD Jawa Tengah 2020. Diunduh di <https://bappeda.jatengprov.go.id/kajian-strategis-dampak-covid-19-di-jawa-tengah/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Diunduh di <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/08/2226/jumlah-penduduk-di-provinsi-jawa-tengah-2020.html>
- Aini, S. D., Kurnia, E., & Wibisono, S. (2019). The Influence of Local Revenue and Equalization Fund on Economic Growth in East Nusa Tenggara Province. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 125–134. <https://doi.org/10.29259/jep.v17i2.8992>
- Akhmad, Z., Munawar, I., Multifiah, & Ghozali, M. (2019). Local Income and Economic Growth. *Eurasia: Economics & Business*, 2(20), 13–26. file:///C:/Users/kartika/Documents/SEMANGAT YOKK SKRIPSI/Referensi/JURNAL_Kartika/Jurnal Internasional/jurnal dalam bahasa Inggris/Zainuddin Akhmad.pdf

- Choi, N. H. (2021). Analyzing local government capacity and performance: Implications for sustainable development. *Sustainability (Switzerland)*, *13*(7).
<https://doi.org/10.3390/su13073862>
- Diastrina, D. (2021). *ProBisnis : Jurnal Manajemen The Influence of Regional Original Income (PAD) and Remaining Budget Financing (SiLPA) on Economic Growth with General Allocation Funds (Dau) as Moderating Variables in Regency / City Governments in North Sumatra Provinc.* *12*(9), 8–15.
- Djayanthi, M. R., & Juniarti. (2020). The Effect of Regional Original Income, Balancing Fund and Capital Expenditure on Regional Economic Growth in Dki Jakarta Province. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, *2012*, 1–14.
- Dwiarta, I. M., & Asjari, F. (2020). The Effect of Regional Original Income and Accuracy of Shopping Allocation on Regional Economic Growth in Lamongan. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, *4*(4), 1068–1081.
<https://doi.org/10.33122/ijase.v2i2.156>
- Khatulistiwa, A. (2021). the Effect of Budget Refocusing During the Covid-19 diter on the Realization of the Apbd in Central Java Province. *Marginal : Journal of Management, Accounting, General Finance and International Economic Issues*, *1*(1), 65–71.
<https://doi.org/10.55047/marginal.v1i1.89>
- Kurantini, N. (2017). The Effects of Budget Deficit on Economic Growth and Development: The Experience of Ghana (1994 – 2014). *European Scientific Journal, ESJ*, *13*(4), 211.
<https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n4p211>
- Sengaji, M., Sasongko, S., & Sakti, R. (2019). Determinant of Regional Economic Growth in East Java, Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *11*(2), 104–115.
<https://doi.org/10.17977/um002v11i22019p104>
- Sukmaadi, D. P. S., & Marhaeni, A. A. I. N. (2021). Economic growth and inequality of income distribution between regions: Evidence from Bali Province, Indonesia. *Journal of Socioeconomics and Development*, *4*(1), 69. <https://doi.org/10.31328/jсед.v4i1.1676>
- Todorova, T. . (2019). Government Budget Balance And Economic Growth. *Journal of International Scientific Publications*, *13*(9), 1689–1699.
- Vincent, C. (2015). Local Government Capacity Building and Development: Lessons, Challenges and Opportunities. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, *03*(01), 1–5.
<https://doi.org/10.4172/2332-0761.1000149>
- Yasin, M. yasin. (2019). Analysis of Regional Original Income Levels in Regional Financial Performance on Economic Growth in East Java Province. *Archives of Business Research*, *7*(10), 222–229. <https://doi.org/10.14738/abr.710.7320>